

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 136/PMK.04/2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2017
TENTANG KEBERATAN DI BIDANG
KEPABEANAN DAN CUKAI

A. CONTOH FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

1) CONTOH FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN YANG MENIMBULKAN TAGIHAN

SURAT PENGAJUAN KEBERATAN	
Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai	
Sehubungan dengan(1)..... sebagaimana dimaksud pada surat:	
Nomor	:(2)..... tanggal(3).....
tentang	:(4).....
yang mewajibkan kami/saya untuk membayar kekurangan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp (5) (.....(6).....).	
dengan ini Kami/saya:	
Nama	: (7)
No Identitas	: (8)
Jabatan	: (9)
Alamat	: (10)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(11).....,	
NPWP	:(12).....
Kedudukan	:(13).....
bermaksud untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:	
1(14).....
2(14).....
Demikian surat keberatan ini dibuat dengan sebenarnya.	
.....(15).....,(16)..... Pemohon,	
.....(17).....	
.....(18).....	

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi jenis penetapan yang diajukan keberatan.
Misal : Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Surat Tagihan Cukai 1 (STCK-1).
- Nomor (2) : Diisi nomor Surat Penetapan/Surat Tagihan yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (3) : Diisi tanggal Surat Penetapan/Surat Tagihan yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (4) : Diisi materi Surat Penetapan/Surat Tagihan yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai
Misal : "penetapan atas kekurangan cukai".
- Nomor (5) : Diisi dalam angka, jumlah kekurangan bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda/bunga.
- Nomor (6) : Diisi dalam huruf, jumlah kekurangan bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda/bunga.
- Nomor (7) : Diisi nama orang yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya. Pengajuan oleh kuasanya dalam hal pengajuan dilakukan secara manual.
- Nomor (8) : Diisi no identitas orang yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya dapat berupa no induk kependudukan (NIK), no paspor atau no identitas lainnya. Pengisian no identitas oleh kuasanya dalam hal pengajuan dilakukan secara manual.
- Nomor (9) : kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya. Pengisian jabatan oleh kuasanya dalam hal pengajuan dilakukan secara manual. Isi dengan tanda "-" dalam hal pengajuan dilakukan oleh orang perseorangan.
- Nomor (10) : Diisi alamat lengkap perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan yang dipimpin oleh orang yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam hal pengajuan dilakukan oleh orang perseorangan, diisi alamat orang yang mengajukan.
- Nomor (11) : Diisi nama perusahaan yang dipimpin oleh orang mengajukan keberatan sebagaimana tercantum dalam Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atau nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Dalam hal diajukan oleh orang perseorangan, diisi nama orang yang mengajukan keberatan.
- Nomor (12) : Diisi NPWP perusahaan atau orang yang bersangkutan. Dalam hal orang perseorangan tidak memiliki NPWP dapat diisi tanda "-"
- Nomor (13) : Diisi lokasi perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal diajukan oleh orang perseorangan, diisi lokasi tempat orang yang mengajukan keberatan.
- Nomor (14) : Diisi alasan pengajuan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai dengan jelas dan lengkap yang dapat mendukung pihak yang mengajukan keberatan. Bila ruang yang disediakan tidak cukup dapat dilanjutkan pada lembar berikutnya.
- Nomor (15) : Diisi nama kota lokasi perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal diajukan oleh orang perseorangan, diisi nama kota kedudukan tempat orang yang mengajukan keberatan.
- Nomor (16) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan keberatan dibuat.
- Nomor (17) : diisi tanda tangan orang yang mengajukan permohonan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya. Dalam hal diajukan melalui portal DJBC tidak perlu diisi.
- Nomor (18) : Diisi nama lengkap orang yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya.

2) CONTOH FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN YANG TIDAK MENIMBULKAN TAGIHAN

SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Sehubungan dengan(1)..... sebagaimana dimaksud pada surat nomor :(2)..... tanggal(3)..... tentang:(4)

dengan ini Kami/saya:

Nama : (5)
Nomor Identitas : (6)
Jabatan : (7)
Alamat : (8)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(9),
NPWP : (10)
Kedudukan : (11)

bermaksud untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

1(12).....
2(12).....

Demikian surat keberatan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(13).....,(14).....
Pemohon,

.....(15)

.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi jenis penetapan yang diajukan keberatan.
Misal : Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL).
- Nomor (2) : Diisi nomor Surat Penetapan/Surat Tagihan yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (3) : Diisi tanggal Surat Penetapan/Surat Tagihan yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (4) : Diisi materi Surat Penetapan/Surat Tagihan yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai
Misal : "Penetapan Barang Larangan/Pembatasan".
- Nomor (5) : Diisi nama orang yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya. Pengajuan oleh kuasanya dalam hal pengajuan dilakukan secara manual.
- Nomor (6) : Diisi no identitas orang yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya dapat berupa no induk kependudukan (NIK), no paspor atau no identitas lainnya. Pengisian no identitas oleh kuasanya dalam hal pengajuan dilakukan secara manual.
- Nomor (7) : Diisi jabatan orang yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya. Pengisian jabatan oleh kuasanya dilakukan dalam hal pengajuan secara manual. Isi dengan tanda "-" dalam hal pengajuan dilakukan oleh orang perseorangan.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan yang dipimpin oleh orang yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam hal pengajuan dilakukan oleh orang perseorangan, diisi alamat orang yang mengajukan.
- Nomor (9) : Diisi nama perusahaan yang dipimpin oleh orang mengajukan keberatan sebagaimana tercantum dalam Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atau nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Dalam hal diajukan oleh orang perseorangan, diisi nama orang yang mengajukan keberatan.
- Nomor (10) : Diisi NPWP perusahaan atau orang yang bersangkutan. Dalam hal orang perseorangan tidak memiliki NPWP dapat diisi tanda "-".
- Nomor (11) : Diisi lokasi perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal diajukan. oleh orang perseorangan, diisi lokasi tempat orang yang mengajukan keberatan.
- Nomor (12) : Diisi alasan pengajuan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai dengan jelas dan lengkap yang dapat mendukung pihak yang mengajukan keberatan. Bila ruang yang disediakan tidak cukup dapat dilanjutkan pada lembar berikutnya.
- Nomor (13) : Diisi nama kota lokasi perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal diajukan oleh orang perseorangan, diisi nama kota kedudukan tempat orang yang mengajukan keberatan.
- Nomor (14) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan keberatan dibuat.
- Nomor (15) : Diisi tanda tangan orang yang mengajukan permohonan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya. Dalam hal diajukan melalui portal DJBC tidak perlu diisi.
- Nomor (16) : Diisi nama lengkap orang yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor(1).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....
Nama Perusahaan :(4).....
Alamat Perusahaan :(5).....
NPWP Perusahaan :(6).....

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Barang impor yang kami beritahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor(7)..... tanggal(8)..... nomor kontainer(9)..... saat ini belum dikeluarkan dari kawasan pabean dan belum diterbitkan persetujuan pengeluaran barang.
2. Barang impor yang belum dikeluarkan dari kawasan pabean tersebut berkaitan dengan keberatan atas Surat Penetapan Nomor(10)..... tanggal(11).....
3. Kami bertanggung jawab penuh atas seluruh risiko dan biaya yang timbul selama masa penimbunan barang impor sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan pengajuan keberatan.

.....(12).....,(13).....

..... (14)

(Meterai)

..... (15)

LEMBAR VALIDASI KANTOR BEA DAN CUKAI

Hasil pemeriksaan barang impor:

KRITERIA	TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI
1. Masih berada di kawasan pabean		
2. Belum diterbitkan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai		
3. Bukan merupakan barang yang bersifat peka waktu, tidak tahan lama, rusak, dan/atau berbahaya		

Barang impor sebagaimana dimaksud pada Surat Pernyataan ini telah diperiksa dan disegel oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk keperluan pengajuan keberatan tanpa menyerahkan jaminan.

..... (16),(17).....

..... (18)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Surat Pernyataan.
- Nomor (2) : Diisi nama Orang pribadi sebagai wakil pemilik barang impor, yang menandatangani Surat Pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi nama jabatan Orang pribadi yang menandatangani Surat Pernyataan.
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan yang tercantum dalam Surat Penetapan.
- Nomor (5) : Cukup jelas.
- Nomor (6) : Cukup jelas.
- Nomor (7) : Diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang.
- Nomor (8) : Diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang.
- Nomor (9) : Diisi nomor kontainer/ukuran (dalam hal tidak mencukupi, dibuatkan lampiran tersendiri dan ditulis: "*terlampir*").
- Nomor (10) : Diisi nomor Surat Penetapan yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (11) : Diisi tanggal Surat Penetapan yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (12) : Diisi nama kota tempat penandatanganan Surat Pernyataan.
- Nomor (13) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Surat Pernyataan.
- Nomor (14) : Diisi nama jabatan Orang pribadi yang menandatangani Surat Pernyataan.
- Nomor (15) : Diisi nama Orang pribadi yang menandatangani Surat Pernyataan.
- Nomor (16) : Diisi tempat kawasan pabean tempat barang impor berada.
- Nomor (17) : Diisi tanggal pemeriksaan dan penyegelan.
- Nomor (18) : Diisi nama dan NIP Pejabat Bea dan Cukai yang memeriksa dan menyegel barang impor.
- Catatan : Surat Pernyataan dicetak pada satu lembar yang sama, sehingga halaman kedua dicetak di balik surat pernyataan halaman pertama.

C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN

SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENCABUTAN KEBERATAN

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Sehubungan dengan surat permohonan keberatan kami/saya atas penetapan(1)
..... , dengan ini kami/saya:

Nama : (2)
Nomor Identitas : (3)
Jabatan : (4)
Alamat : (5)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(6) ,
NPWP : (7)
Kedudukan : (8)

bermaksud untuk mengajukan pencabutan keberatan atas(9)..... seperti di maksud
pada surat:

Nomor : (10) tanggal (11)
tentang : (12)

dengan alasan sebagai berikut:

1 (13)
2 (13)

Demikian surat permohonan pengajuan pencabutan keberatan ini dibuat dengan
sebenarnya.

.....(14).....,(15).....

Pemohon,

.....(16)

.....(17).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi jenis keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Misal : "Penetapan Tarif", "Penetapan Nilai Pabean", "Penetapan Kekurangan Cukai", dan/ atau "Penetapan Sanksi Administrasi Berupa Denda".
- Nomor (2) : Diisi nama orang yang mengajukan permohonan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya.
- Nomor (3) : Diisi no identitas orang yang mengajukan permohonan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya dapat berupa no induk kependudukan (NIK), no paspor atau no identitas lainnya. Pengisian no identitas oleh kuasanya dalam hal pengajuan permohonan pencabutan keberatan dilakukan secara manual.
- Nomor (4) : Diisi jabatan orang yang mengajukan permohonan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya. Pengisian jabatan oleh kuasanya dilakukan dalam hal pengajuan secara manual. Isi dengan tanda "-" dalam hal pengajuan permohonan pencabutan keberatan dilakukan oleh orang perseorangan.
- Nomor (5) : Diisi alamat lengkap perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan yang dipimpin oleh orang yang mengajukan permohonan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam hal pengajuan permohonan pencabutan keberatan dilakukan oleh orang perseorangan, diisi alamat orang yang mengajukan.
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan yang dipimpin oleh orang mengajukan permohonan pencabutan keberatan sebagaimana tercantum dalam Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC)/nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Dalam hal diajukan oleh orang perseorangan, diisi nama orang yang mengajukan permohonan pencabutan keberatan.
- Nomor (7) : Diisi NPWP perusahaan atau orang yang bersangkutan. Dalam hal orang perseorangan tidak memiliki NPWP dapat diisi tanda "-".
- Nomor (8) : Diisi lokasi perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal diajukan oleh orang perseorangan, diisi lokasi tempat orang yang mengajukan permohonan pencabutan keberatan.
- Nomor (9) : Diisi jenis penetapan yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Misal : Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Surat Tagihan Cukai (STCK-1).
- Nomor (10) : Diisi nomor surat penetapan yang hendak dicabut pengajuan keberatannya.
- Nomor (11) : Diisi tanggal penetapan yang hendak dicabut pengajuan keberatannya.
- Nomor (12) : Diisi materi surat penetapan yang hendak dicabut pengajuan keberatannya, misalnya: "penetapan atas kekurangan cukai".
- Nomor (13) : Diisi alasan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai dengan jelas dan lengkap yang dapat mendukung pihak yang mengajukan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Bila ruang yang disediakan tidak cukup dapat dilanjutkan pada lembar berikutnya.
- Nomor (14) : Diisi nama kota lokasi perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal diajukan oleh orang perseorangan, diisi nama kota kedudukan tempat orang yang mengajukan permohonan pencabutan keberatan.
- Nomor (15) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan keberatan dibuat.
- Nomor (16) : Diisi tanda tangan orang yang mengajukan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya. Dalam hal diajukan melalui portal DJBC tidak perlu diisi.
- Nomor (17) : Diisi nama lengkap orang yang mengajukan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001